



HISTORIA VITAE

Seri Pengetahuan dan Pengajaran Sejarah

Volume 28, No. 1, April 2014

ISSN - 0215-8809

- ☐ **REVOLUSI BOLSHEVIKS**
Sutarjo Adisusilo, I.R.
- ☐ **KEWIRAUUSAHAAN KOTA GEDE MASA KOLONIAL: STUDI TENTANG
DAYA DUKUNG**
Anton Meryono
- ☐ **MENGGKRITISI SUMBER BELAJAR SEJARAH PERISTIWA 1965:
ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN ILMIAH**
Hendra Kurniawan
- ☐ **STRATEGI PEMBELAJARAN SEJARAH PERISTIWA 1965 UNTUK
TINGKAT SMA**
Yulius Dwi Cahyono
- ☐ **PERKEMBANGAN MASALAH MORO 1975-1994**
A. Kardiyat Wiharyanto

Diterbitkan oleh :

Program Studi Pendidikan Sejarah – FKIP, Jurusan Ilmu Sejarah – Fakultas Sastra

Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

HISTORIA VITAE adalah majalah ilmiah yang berisi kumpulan hasil penelitian dan/atau karangan ilmiah mengenai kependidikan dan/atau kesejarahan dari para dosen dan alumni Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP dan Jurusan Ilmu Sejarah-Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma. Majalah ini terbit dua kali setahun: April dan Oktober.

Redaksi menerima naskah, baik yang berbahasa Indonesia, maupun berbahasa Inggris. Naskah harus ditulis sesuai dengan format yang berlaku di **HISTORIA VITAE**, dan harus diterima oleh redaksi paling lambat dua bulan sebelum terbit. Isi karangan yang dimuat tidak selalu mencerminkan pendapat Redaksi, maka tanggung jawab isi sepenuhnya di tangan penulis.

DEWAN REDAKSI

Pemimpin Umum/Penanggung Jawab/

Pemimpin Redaksi

Anggota Dewan Redaksi

: Dr. H. Purwanta, M.A.

: Dr. Anton Haryono, M.Hum.

Dra. Sumini Theresia, M.Pd.

Drs. Y.R. Subakti, M.Pd.

Drs. Sutarjo Adisusilo J.R., S.Th., M.Pd.

Drs. A. Kardiyat Wiharyanto, M.M.

Drs. B. Musidi, M.Pd.

REDAKTUR AHLI

Dr. F.X. Baskara T. Wardaya, S.J., M.A. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

Dr. S. Nawiyanto Universitas Jember

REDAKTUR PELAKSANA

Hendra Kurniawan, M.Pd.

Yulius Dwi Cahyono, M.Pd.

SEKRETARIAT ADMINISTRASI

Junaidi Agus Sularto

ALAMAT REDAKSI

Program Studi Pendidikan Sejarah-FKIP, Universitas Sanata Dharma

Mrican, Tromol Pos 29, Yogyakarta 55002

Telepon (0274) 513301, 515352; Fax. (0274) 562383

Telegram: SADHAR YOGYA

E-mail: spps@staff.usd.ac.id

HISTORIA VITAE

SERI PENGETAHUAN DAN PENGAJARAN SEJARAH

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Editorial	iii
<i>Revolusi Bolsheviks</i>	1 - 26
<i>Sutarjo Adisusilo, J.R.</i>	
<i>Kewirausahaan Kota Gede Masa Kolonial: Studi Tentang Daya Dukung</i>	27 - 48
<i>Anton Haryono</i>	
<i>Mengkritisi Sumber Belajar Sejarah Peristiwa 1965: Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah</i>	49 - 69
<i>Hendra Kurniawan</i>	
<i>Strategi Pembelajaran Sejarah Peristiwa 1965 untuk Tingkat SMA</i>	70 - 87
<i>Yulius Dwi Cahyono</i>	
<i>Perkembangan Masalah Moro 1975-1994</i>	88 - 103
<i>A. Kardiyat Wiharyanto</i>	

EDITORIAL

HISTORIA VITAE Volume 28 Nomor 1 yang terbit di bulan April 2014 ini tampil dengan susunan redaksi yang baru. Tentunya kita semua berharap penerbitan **HISTORIA VITAE** dapat semakin baik dan segera menjadi jurnal ilmiah yang terakreditasi. Edisi kali ini menghadirkan lima artikel ilmiah dengan beragam tema. Diawali tulisan dari Sutarjo Adisusilo, J.R. yang mengkaji mengenai **Revolusi Bolsheviks**. Berikutnya Anton Haryono kembali menyajikan tema sejarah sosial ekonomi masih tentang kewirausahaan di ibu kota Mataram. Tulisannya kali ini berjudul **Kewirausahaan Kota Gede Masa Kolonial: Studi Tentang Daya Dukung**.

Dua tulisan berikutnya disajikan oleh dua orang dosen muda dengan tema mengenai sejarah kontroversial Peristiwa 1965. Tulisan dari Hendra Kurniawan berjudul **Mengkritisi Sumber Belajar Sejarah Peristiwa 1965: Antara Kepentingan Politik dan Ilmiah** mengajak kita mencermati berbagai perspektif dari sumber-sumber belajar sejarah Peristiwa 1965. Dengan adanya sekian banyak perspektif mengenai Peristiwa 1965 maka Yulius Dwi Cahyono memaparkan mengenai **Strategi Pembelajaran Sejarah Peristiwa 1965 untuk Tingkat SMA**. Terakhir tulisan dari A. Kardiyat Wiharyanto kembali menambah pengetahuan kita mengenai sejarah Asia Tenggara. Dosen senior ini menyajikan tulisan berjudul **Perkembangan Masalah Moro 1975-1994**.

Akhir kata, selamat membaca dan terus berkarya.

Redaksi

**MENINGKURITISI SUMBER BELAJAR
SEJARAH PERISTIWA 1965:
ANTARA KEPENTINGAN POLITIK DAN ILMIAH**

Hendra Kurniawan

Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peristiwa sejarah tahun 1965 dalam konteks politik, berbagai wacana tentang Peristiwa 1965, dan perlunya paradigma baru dalam menyajikan sumber belajar sejarah Peristiwa 1965. Artikel ini juga menjelaskan mengenai sumber belajar sejarah Peristiwa 1965 dalam buku teks yang biasa digunakan di SMA. Hasilnya menekankan pentingnya belajar sejarah sebagai kajian ilmiah dan perlunya mengembangkan kemampuan berpikir kritis mengenai sejarah Peristiwa 1965. Pembelajaran sejarah harus mampu menumbuhkan kesadaran sejarah dan jangan menjadi alat kepentingan politik.

ABSTRACT

This article aims to explain the historical events of 1965 in the context of political, various discourses about events of 1965, and the need for a new paradigm in presents the historical learning resources events of 1965. This article also explain the historical learning resources events of 1965 within textbooks in the Senior High School. The results of this article emphasize the importance of learning history as a scientific research and opening up of critical thinking about events of 1965. Learning history should be able to grow the historical awareness and not become political tool.

Keywords: Peristiwa 1965, sumber belajar, kepentingan politik, kajian ilmiah, buku teks.

PENDAHULUAN

Peristiwa 30 September 1965 menimbulkan efek lanjut bagi perkembangan politik nasional. Peristiwa ini menjadi penanda sejarah berakhirnya pemerintahan Soekarno sekaligus awal bagi dimulainya Orde Baru. Presiden Soekarno dengan perlahan namun pasti mulai dipereteli kekuasaannya. Selain itu upaya pemulihan stabilitas negara pasca Peristiwa 1965 telah menjadi tragedi kemanusiaan yang besar bagi bangsa ini. Tak ayal lagi sejarah mengenai seputar Peristiwa 1965 sarat dengan muatan politis.

Orde Baru dengan kekuatan militer berusaha mengeliminasi Partai Komunis Indonesia (PKI) yang dituduh melakukan percobaan penggulingan kekuasaan melalui Gerakan 30 September 1965. PKI disebut akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi komunis sehingga militer merasa PKI harus dibersihkan sampai ke akar-akarnya. Orde Baru melihatnya sebagai usaha penting dalam rangka menuju era baru bagi Indonesia. Untuk menjamin keberlangsungan era baru tersebut maka pemerintah Orde Baru mewujudkannya dalam ingatan kolektif masyarakat melalui monumen, museum, dan buku pelajaran di sekolah.

Terkait dengan pendidikan, pelajaran sejarah di sekolah memegang peran penting bagi pembentukan watak dan karakter generasi muda. Terutama penanaman sikap kebangsaan dan nasionalisme. Menyadari hal itu maka pemerintah Orde Baru merasa perlu menyusun sebuah pandangan bersama mengenai sejarah nasional. Dari situlah lahir sejarah resmi versi Orde Baru yang menjadi sumber utama penulisan sejarah Indonesia termasuk buku pelajaran sejarah.

Sumber-sumber mengenai peristiwa sejarah yang mengundang kontroversi dilarang. Tidak sedikit buku ilmiah maupun media massa yang tidak sejalan dengan pandangan pemerintah diberangus. Setelah rezim Orde Baru tumbang maka terbukalah ruang untuk mempertentangkan sejarah resmi versi Orde Baru. Berbagai pemikiran dan tulisan bermunculan melahirkan sekian banyak versi baru terkait dengan tema kontroversial dalam sejarah Indonesia, termasuk mengenai Peristiwa 1965. Tentu hal ini perlu disikapi secara bijak sebagai upaya mengembalikan pembelajaran sejarah pada relnya.

Sumber belajar sejarah di sekolah saat ini perlu lebih bervariasi. Apalagi pembelajaran sejarah pada tingkat SMA tidak sekedar menginformasikan fakta dan peristiwa. Peserta didik pada tingkat SMA berada dalam usia yang mampu berpikir secara kritis dan analitis. Untuk itu pembelajaran sejarah terutama pada pokok bahasan yang sensitif dan kontroversi perlu mendapat perhatian serius. Peserta didik yang telah melek teknologi dapat memungkinkannya untuk mengakses berbagai wacana baru yang bisa saling bertentangan satu sama lain seputar Peristiwa 1965. Kenyataan ini memaksa guru untuk tidak lagi berpikir apatis yang hanya meyakini satu “kebenaran” sejarah. Pembelajaran sejarah harus berpegang pada prinsip-prinsip ilmiah guna meminimalisir kepentingan politik tertentu.

SEJARAH DAN KEPENTINGAN POLITIK

Rezim Orde Baru menciptakan musuh bersama dengan ancaman-ancaman konflik yang selalu menghantui perjalanan hidup bangsa Indonesia. Orde Baru menekankan adanya kerapuhan persatuan nasional apabila Pancasila tidak dilaksanakan dengan benar. Konflik antara kekuatan pro Pancasila dan anti Pancasila (komunis) pada kurun waktu 1965-1966 diakhiri dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret yang dijadikan alat untuk melarang PKI. Puncaknya yaitu lahir era baru yang bertekad menegakkan dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Meskipun pada kenyataannya tekad tersebut hanyalah kamufase belaka karena yang terjadi kemudian justru kemunculan rezim otoriter yang berhasil mendikte versi sejarah demi melanggengkan kekuasaannya.

Penjagaan ketat terhadap beberapa versi sejarah oleh penguasa Orde Baru sebagian besar merupakan produk militer. Nugroho Notosusanto, seorang sejarawan militer, menjadi orang yang sangat dipercaya oleh Soeharto dalam membangun sejarah resmi pemerintah. Nugroho Notosusanto berperan layaknya pujangga keraton yang berhasil menulis “Babad Keraton” Orde Baru yaitu buku Sejarah Nasional Indonesia (SNI). Pada awalnya SNI memang ditulis bersama-sama oleh sejarawan-sejarawan kawakan Indonesia yang bersikap objektif,

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

namun pada akhirnya banyak di antara mereka yang memilih mundur karena penulisan SNI dirasa sarat kepentingan politik.

Salah satu tema yang vital ialah Peristiwa 1965 karena berpengaruh penting bagi dimulainya kekuasaan Orde Baru. Pasca peristiwa tersebut lahirlah Supersemar yang dianggap sebagai legitimasi bagi peralihan kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Sampai hari ini Supersemar masih menjadi kontroversi terutama soal keberadaan dan munculnya beberapa versi surat perintah tersebut. Akan tetapi bagaimanapun juga Supersemar dianggap sebagai awal dari dimulainya pemerintahan baru.

Demikian pula dengan Film Pengkhianatan G30S/PKI karya Arifin C. Noer telah menjadi sarana ampuh dalam menanamkan kebencian terhadap PKI dan menjadikan PKI sebagai musuh bersama yang wajib diwaspadai. Pada masa Orde Baru film ini selalu diputar setiap malam menjelang 1 Oktober. Film ini melukiskan berbagai penyiksaan yang dilakukan PKI. Tentang penyiksaan terhadap jenderal ini diragukan kebenarannya. *Visum et repertum* dokter yang memeriksa jenazah para jenderal setelah dikeluarkan dari sumur tua tidak menyebutkan adanya penyiksaan keji (Asvi Warman Adam, 2007:71-72). Pada tahun 1998, film ini dihentikan pemutarannya pada seluruh saluran televisi. Ini merupakan langkah awal yang baik untuk membuka kemungkinan mengenai pemikiran dan versi lain tentang peristiwa memilukan tersebut.

Sebagai musuh bersama yang menjadi bahaya laten maka tidak hanya PKI yang bernasib buruk. Tan Malaka dan Alimin Prawirodirdjo keduanya pernah berjasa bagi negara namun menganut paham komunis. Mereka diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1963 dan 1964. Pengangkatan mereka tentu tidak dapat dibatalkan, namun pada masa Orde Baru nama keduanya harus “dilenyapkan” dari daftar pahlawan nasional demi kepentingan politik. Dalam *Album Pahlawan Bangsa* yang beberapa kali dicetak ulang sejak tahun 1977, nama mereka tidak disebut, apalagi diabadikan sebagai nama jalan, gedung, atau bandara. Menurut seorang pejabat di Kementerian Sosial tahun 2004, mereka termasuk *off the record* (Harry A. Poeze, 2008:160).

Orde Baru berusaha meyakinkan rakyat bahwa mereka adalah penyelamat bangsa dari upaya perebutan kekuasaan yang hendak

dilakukan oleh PKI. Untuk itu pemerintah masih merasa perlu menyusun rujukan resmi mengenai Peristiwa 1965. Sekretariat Negara tahun 1994 menerbitkan buku yang berjudul *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya* “Buku putih” ini dianggap memojokkan TNI Angkatan Udara karena menyebutkan Pangkalan Udara Halim sebagai sarang G30S/PKI. Sebagai tanggapan maka Perhimpunan Purnawirawan TNI AU menerbitkan buku berjudul *Menyingkap Kabut Halim 1965*. Sayangnya buku ini baru terbit tahun 1999 setelah Orde Baru tumbang (Asvi Warman Adam, 2009:126-127).

Melalui SNI, “buku putih”, dan Film Pengkhianatan G30S/PKI pada intinya menekankan kekejaman dan kebiadaban Peristiwa 30 September yang dilakukan oleh PKI. Bagi Orde Baru, PKI terlibat penuh dalam kebrutalan itu. Meskipun aksi ini menamakan diri Gerakan 30 September namun dalam berbagai buku teks pembaca diarahkan untuk lebih memilih istilah G30S/PKI (Michael Wood, 2013:204). Penyeragaman sejarah nasional khususnya mengenai Peristiwa 1965 telah menutup kemungkinan bagi versi-versi lain bermunculan dengan bebas. Ada banyak buku yang nekat terbit dan beredar pada masa Orde Baru harus mengalami nasib pembredelan oleh Kejaksaan Agung. Buku berjudul *Bayang-Bayang PKI* (1995) ataupun buku tulisan Harold Crouch yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia* menjadi contoh dari buku-buku yang menjadi korban pencekalan dan diberi label “berbahaya” oleh rezim Orde Baru.

Demi mempertahankan kekuasaannya maka Orde Baru melakukan pengendalian secara ketat terhadap media dan pendidikan, mengekang kebebasan berpendapat, dan memanfaatkan kekuatan militer sebagai bagian dari pemerintahan yang memiliki tugas utama menangani ancaman keamanan dan ketertiban nasional dan perlawanan terhadap rezim penguasa. Militer menjadi pemain politik belakang layar seperti aspri dan opsus, maupun pemain langsung dalam birokrasi yang memegang jabatan kunci sebagai anggota Golkar, menteri, hingga kepala daerah (Katherine E. McGregor, 2008:66).

Menurut Asvi Warman Adam (2009:142), strategi pengendalian

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

sejarah pada masa Orde Baru mencakup dua hal yaitu mereduksi peran Soekarno dan membesar-besarkan jasa Soeharto. Mengkerdilkan peran Soekarno dimulai dari soal lahirnya Pancasila, penghilangan gambar Soekarno dalam foto pengibaran bendera saat proklamasi kemerdekaan, pelarangan ajaran Soekarno, pelarangan pendirian Universitas Bung Karno, penentuan tempat bagi pemakaman Soekarno, penamaan jalan atau tempat-tempat penting dengan namanya, hingga soal pengangkatannya sebagai pahlawan nasional (pahlawan proklamator). Tindakan membesarkan peran Soeharto dilakukan melalui buku sejarah dan media lainnya seperti film. Beberapa di antaranya ada film Janur Kuning (1979) dan Serangan Fajar (1981) yang berkisah tentang peran Soeharto dalam Serangan Oemoem 1 Maret 1949.

Penguasaan ingatan kolektif juga dilakukan melalui buku-buku pelajaran, pembangunan monumen, dan berbagai upacara peringatan. Tumbangnya Orde Baru melahirkan pemikiran untuk meluruskan sejarah termasuk pembelajarannya di sekolah-sekolah. Untuk itu pada tahun 1999, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Juwono Sudarsono meminta Masyarakat Sejarahwan Indonesia (MSI) bekerja sama dengan Direktorat Sejarah Depdikbud untuk menyusun suplemen pengajaran sejarah. Suplemen ini dimaksudkan untuk menjelaskan masalah-masalah kontroversial dalam sejarah Indonesia. Penyempurnaan pengajaran sejarah juga bertujuan untuk menekankan bahwa sejarah Indonesia bukan hanya Pulau Jawa (Jawasentris) namun juga perlu mengangkat tema-tema sejarah lokal yang ada di luar Jawa. Masalah yang dianggap kontroversial antara lain Gerakan 30 September, Supersemar, Serangan Oemoem 1 Maret 1949, lahirnya Pancasila, lahirnya Orde Baru, dan Integrasi Timor Timur (Asvi Warman Adam, 2009:12).

Ironisnya sebelum tugas ini diselesaikan oleh MSI, ternyata ada tim lain dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengeluarkan suplemen serupa namun tidak menjawab masalah kontroversial dalam sejarah Indonesia itu. Semakin jelas bahwa bagaimanapun sejarah tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik. Kejaksaan Agung pada tanggal 5 Maret 2007 mengeluarkan Surat Keputusan No. 019/A/JA/03/2007 untuk melarang buku-buku pelajaran sejarah yang

tidak membahas keterlibatan PKI dalam Peristiwa 1948 dan 1965 (Asvi Warman Adam, 2009:xxv). Sudah delapan tahun reformasi bergulir namun kebebasan ilmiah masih terkungkung dan sejarah masih saja ditunggangi kepentingan politik. Padahal di masyarakat sudah beredar berbagai macam wacana seputar Peristiwa 1965. Menjadi benar yang diungkapkan oleh S. K. Kochhar (2008:9) bahwa “sejarah adalah akar dan politik adalah buahnya”.

BERBAGAI WACANA MENGENAI PERISTIWA 1965

Wacana sejarah sejak bergulirnya reformasi makin beragam namun sikap masyarakat terhadap sejarah yang kontroversi masih sering diliputi kekerdilan jiwa. Berbagai pengungkapan data baru maupun tafsir sejarah yang berbeda dengan versi resmi masih dikecam. Gema reformasi telah menggusur dominasi dan hegemoni militer dari dunia sosial politik. Militer seiring dengan prinsip demokrasi yang makin menguat bersedia mengakui supremasi sipil.

Kisah mengenai Gerakan 30 September dan Supersemar menjadi ikon utama dalam kontroversi sejarah di Indonesia. Wacana sejarah mengenai hal tersebut makin banyak dikupas, namun pemahaman dan kesadaran sejarah justru makin menipis. Paulo Freire sebagaimana yang disitir oleh Hariyono dalam makalahnya yang berjudul “Kontroversi Sejarah Indonesia: Distorsi Komunikasi yang Sistemik, Sebuah Dialektika Tanpa Sintesa” yang disampaikan dalam Seminar Nasional Menumbuhkembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Sejarah Kontroversial tanggal 29 Mei 2013 di Aula Gedung Pascasarjana UNS mengistilalkannya sebagai *historical anesthesia*, masyarakat telah terbius dan tidak merasa ikut bertanggung jawab pada proses sejarah bangsanya.

Memahami Peristiwa 1965 tidak dapat dilakukan secara sepotong-sepotong. Peristiwa ini memiliki prolog dan epilog yang rumit. Sebelum Gerakan 30 September meletus kondisi politik negara saat itu telah memanas. Demokrasi Terpimpin dengan prinsip Nasakomnya telah memberi kesempatan bagi PKI. Hal ini membuat militer yang sejak dulu menjadi musuh besar PKI tidak bisa bersikap tenang-tenang saja.

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

Soekarno, tentara, dan PKI telah menjadi segitiga kekuasaan yang saling mempengaruhi pada masa itu. Wartawan senior Rosihan Anwar dalam catatan pribadinya tanggal 5 Oktober 1965 menuliskan bahwa di hari-hari mendatang akan terjadi perubahan dan perimbangan politik dan kekuasaan. Soekarno, tentara, dan PKI akan saling berbenturan lebih keras sampai salah satu dari mereka muncul sebagai pemenang (Rosihan Anwar, 2007:383). Dugaan ini tidak berlebihan karena tidak lama setelahnya muncul konflik eksplosif yang berujung pada peralihan kekuasaan pemerintahan.

Detail sebenarnya beserta siapa di belakang Gerakan 30 September dan tujuannya masih bersifat abu-abu hingga saat ini. Akan tetapi fakta dasar mengenai yang terjadi pada malam itu sudah cukup jelas. Sekelompok orang bersenjata menculik tujuh perwira tinggi Angkatan Darat. Beberapa dari mereka yang melakukan penolakan kemudian dibunuh di rumah mereka dan beberapa lagi dibawa ke dekat Pangkalan Udara Halim di Lubang Buaya. Di sana mereka dibunuh dan mayat mereka dimasukkan ke dalam sebuah sumur tua. Gerakan ini kemudian ditumpas oleh Panglima Kostrad Letjen Soeharto yang kemudian muncul sebagai figur nasional peletak dasar Orde Baru. Kegagalan Gerakan 30 September menjadi penentu lanskap politik dan kultural bagi Indonesia untuk sekian dekade ke depan (Michael Wood, 2013:193).

Perubahan utama akibat Peristiwa 1965 yaitu terjadinya suksesi kepemimpinan nasional. Tentang peralihan kekuasaan pemerintahan, Ulf Sundhaussen (1986:370) mengungkapkan dengan jelas bahwa pada tanggal 1 Oktober 1965 sebenarnya kekuasaan Soekarno mulai surut. Letjen Soeharto hari itu dengan tegas melarang Mayjen Pranoto Reksosamudro, Asisten III (Personil) Panglima AD, untuk pergi memenuhi panggilan presiden yang sedang berada di Pangkalan Udara Halim. Setelah mengetahui kematian Letjen Ahmad Yani, Soekarno menunjuk Mayjen Pranoto untuk menggantikan Yani. Sementara itu Letjen Soeharto telah memutuskan bahwa dia untuk sementara waktu mengambil alih pimpinan Angkatan Darat sesuai ketentuan apabila Panglima AD berhalangan maka digantikan oleh Pangkostrad. Soeharto melarang Mayjen Pranoto menemui Soekarno dengan alasan dia tidak

mau kehilangan lebih banyak jenderal karena wilayah Halim telah dicurigai sebagai markas Gerakan 30 September. Meskipun memiliki banyak pertimbangan namun sikap Soeharto yang berani menolak perintah Soekarno ini menjadi awal bagi rontoknya kekuasaan Soekarno.

Keberhasilan Soeharto mengatasi keadaan sejak pagi tanggal 1 Oktober 1965, tidak dapat dipungkiri telah membuatnya diangkat sebagai Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Pangkobkamtib) dan Panglima Angkatan Darat. Pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto juga berhasil mendapatkan Supersemar yang digunakannya sebagai dasar membubarkan PKI dan menahan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam Gerakan 30 September. Perlahan kekuasaan Soekarno semakin dipreteli. Kebijakan-kebijakan politik yang sifatnya non teknis militer semestinya menjadi wewenang presiden sebagai kepala pemerintahan sejak itu dapat diambil oleh Soeharto selaku Panglima AD/Pangkopkamtib atas dasar Supersemar. Khawatir Supersemar dapat dicabut oleh Presiden Soekarno maka Supersemar segera disahkan menjadi Ketetapan MPRS pada tahun 1967 (Julius Pour, 2010:181).

Meskipun secara fisik surat aslinya tidak pernah ditemukan sehingga menimbulkan banyak kontroversi, namun keberadaan Supersemar tidak dapat dipungkiri. Presiden Soekarno dalam pidato Jangan Sekali-kali Meninggalkan Sejarah (Jasmerah) tanggal 17 Agustus 1966 dengan tegas menyatakan mengenai SP 11 Maret yang diberikannya pada Letjen Soeharto untuk mengatasi keadaan dan menjaga wibawa presiden. Dalam pidato tersebut Presiden Soekarno juga menyampaikan rasa terima kasihnya pada Letjen Soeharto karena telah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun Soekarno sebagai pemberi perintah juga menekankan bahwa SP 11 Maret bukanlah peralihan kekuasaan (*transfer of authority*). Maka apabila Supersemar oleh banyak pihak dianggap sebagai perintah peralihan kekuasaan dan pelimpahan wewenang pemerintahan dari Soekarno kepada Soeharto tentu itu suatu kekeliruan. Jikalau kemudian Supersemar dijadikan legitimasi bagi pengambilan keputusan politis yang dilakukan oleh Soeharto dan menjadi tonggak berdirinya pemerintah Orde Baru maka menjadi persoalan lain.

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

Ketika mencermati berbagai tahap demi tahap yang melatarbelakangi munculnya Supersemar sekaligus upaya penyingkiran kekuasaan dan pengaruh Soekarno sebagai presiden menunjukkan bahwa Supersemar merupakan bagian dari pelengseran kekuasaan. Beberapa ahli mengatakan bahwa periode 1 Oktober 1965 sampai 11 Maret 1966 dapat disebut sebagai kudeta merangkak (*a creeping coup*). Salah satu dokumen CIA juga menyebut bahwa Supersemar sebagai suatu “kudeta yang khas Indonesia” (Baskara T. Wardaya, 2007:26; Asvi Warman Adam, 2006:15-17).

Wacana lain dapat juga dijumpai dalam buku tulisan Harold Crouch (1999) yang berjudul *Militer dan Politik di Indonesia*. Buku ini pernah dilarang beredar di dalam negeri karena menuliskan keterlibatan militer dalam Gerakan 30 September 1965 yang membawa keuntungan bagi Soeharto untuk dapat menduduki kursi kepresidenan. Harold Crouch juga mengungkapkan berbagai kepentingan ekonomi Angkatan Darat yang mendapat posisi strategis pada masa Orde Baru berkuasa. Menurut Harold Crouch ada dua faksi dalam tubuh Angkatan Darat yang berbeda sikap dalam menghadapi Soekarno. Faksi tengah pimpinan Yani bersikap loyal pada Soekarno, sedangkan faksi kanan yang di dalamnya terdapat Nasution dan Soeharto berseberangan dengan kebijakan Soekarno. Gerakan 30 September berhasil menyingkirkan kekuatan faksi tengah dan melapangkan jalan meraih kekuasaan bagi faksi kanan. Tentang versi adanya konflik intern AD memicu munculnya gerakan juga dikemukakan oleh Benedict R. Anderson dan Ruth T. McVey tahun 1971 dalam penelitiannya *Cornell Paper* yang berjudul *A Preliminary Analysis of The October 1, 1965: Coup in Indonesia*.

Pemikiran mengenai keterlibatan Soekarno sebagai orang yang sebenarnya sudah mengetahui akan adanya gerakan kemudian memanfaatkan gerakan tersebut juga bermunculan. Belum lama ini tulisan yang menyudutkan Soekarno dan adanya dugaan keterlibatan komunis RRC ialah karya Victor M. Fic yang berjudul *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi*. Dalam tulisan ini disebutkan bahwa karena termakan isu Dokumen Gilchrist tentang adanya jenderal-jenderal AD yang tidak loyal, Soekarno memerintahkan Letkol Untung,

Komandan Tjakrabirawa, untuk menghabisi para jenderal tersebut yang diduga akan melakukan kudeta (Victor M. Fic, 2005:108-109).

Kerstin Beise (2004) dalam bukunya yang berjudul “Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S?” pernah membandingkan berbagai tulisan mengenai Gerakan 30 September dan hubungannya dengan Soekarno. Dia mencoba membandingkan 22 karya baik yang menyatakan Soekarno terlibat maupun tidak terlibat. Beberapa tulisan tentang hal tersebut yang dianggapnya objektif antara lain tulisan Ben Anderson, John Legge, Harold Crouch, Horst Landmann, dan tim ISAI. Beberapa tulisan lain bersifat terlalu subjektif misalnya tulisan Anthony C. A. Dake dan Hughes terlihat menyudutkan Soekarno yang dianggap telah mengetahui rencana Gerakan 30 September, sementara Soebandrio dan Manai Sophiaan lebih tampil sebagai pembela Soekarno. Maka meskipun tidak menghasilkan kesimpulan apakah Soekarno terlibat atau tidak dalam Gerakan 30 September, namun tulisan Kerstin Beise memberikan kontribusi pula dalam berkembangnya berbagai macam wacana seputar Peristiwa 1965 yang digelapkan pada masa Orde Baru.

Tuduhan terhadap Soeharto sebagai pelaku maupun orang yang mengetahui rencana Gerakan 30 September sejak awal tidak kalah banyak. Tulisan W. F. Wertheim tahun 1971 yang berjudul *Soeharto and the Untung Coup-The Missing Link* membahas mengenai kedekatan antara Soeharto dengan para perwira yang terlibat dalam Gerakan 30 September yaitu Letkol Untung dan Kol. Latief. Tumbangnya Orde Baru semakin mengembangkan wacana tentang keterlibatan Soeharto ini dan keuntungan yang diperolehnya. Kebanyakan dari mereka menyoroti mengenai kelihaihan Soeharto dalam memanfaatkan situasi untuk menuju pada puncak kekuasaan, misalnya tulisan-tulisan karya Asvi Warman Adam dan Baskara T. Wardaya. Selain itu banyak pula penulis yang menghendaki pelurusan sejarah Indonesia dan perubahan terhadap historiografi sejarah Indonesia yang pada masa Orde Baru dipenuhi kepentingan politik rezim.

Dalam konteks Perang Dingin maka wacana mengenai keterlibatan Amerika Serikat melalui CIA dalam Peristiwa 1965 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno dan naiknya Soeharto sebagai pemimpin baru juga

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

dapat diterima. Amerika Serikat dengan paham liberalnya bersaing dengan Uni Soviet yang berpaham komunis. Berbagai upaya Amerika Serikat untuk menyingkarkan paham komunis dilakukan dari sekedar memberikan bantuan ekonomi hingga keterlibatannya dalam penggulingan terhadap rezim di suatu negara yang dianggap mengancam kepentingan Amerika Serikat.

PKI sebagai kekuatan komunis di Indonesia merupakan yang terbesar saat itu setelah Uni Soviet dan RRC. Amerika Serikat berkepentingan menghancurkan PKI dan menyingkirkan Soekarno yang dianggap telah memberi kebebasan bagi berkembangnya komunis di Indonesia dan berani melawan keinginan Amerika Serikat. Salah satu tulisan terkenal mengenai keterlibatan Amerika Serikat yaitu karya Peter Dale Scoot (2007) yang berjudul *Peran CIA dalam Penggulingan Soekarno*. Joesoef Isak (2007) melalui Penerbit Hasta Mitra juga pernah menghimpun dokumen rahasia CIA yang telah dibuka untuk umum mengenai peran CIA di awal pemerintahan Soeharto.

Berbagai wacana yang sebenarnya sudah lama muncul dan setelah Orde Baru tidak lagi berkuasa menjadi makin berkembang merupakan bukti bahwa Peristiwa 1965 memang tidak dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Peristiwa sejarah ini memiliki banyak dimensi yang perlu ditilik dan dikupas satu per satu agar didapatkan pemahaman yang utuh dan tidak berat sebelah. Pandangan yang netral dan objektif terhadap suatu peristiwa sejarah sangat diperlukan bagi generasi mendatang dalam memahami perjalanan hidup bangsanya. Oleh karena itulah pembelajaran sejarah di sekolah juga perlu memperhatikan berbagai wacana yang berkembang ini agar pendidikan tidak menjadi alat bagi suatu rezim untuk menanamkan doktrin kekuasaannya. Hal seperti ini tepat dan sangat diperlukan karena siswa usia SMA sudah mampu berpikir secara kritis dan analitis.

Dalam pembelajaran sejarah di sekolah dengan menyajikan sekian banyak wacana dan pemikiran-pemikiran kritis seputar Peristiwa 1965 bukan bermaksud mencari mana yang benar dan mana yang salah. Permasalahan yang utama ialah mengenalkan suatu pemikiran alternatif dan menanamkan kesadaran sejarah pada peserta didik. Jika pemerintah

dan masyarakat tidak paham dengan sejarahnya maka akan mudah mengalami degradasi karakter berbangsa. Perbedaan narasi sejarah dan kontroversinya dapat menjadi refleksi diri (otokritik) untuk membangun cara pandang sejarah yang baru dan komprehensif.

PARADIGMA BARU PENYAJIAN SUMBER BELAJAR SEJARAH PERISTIWA 1965

Selama ini sejarah yang diajarkan di sekolah-sekolah adalah versi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan dilindungi oleh aparat keamanan. Pembelajaran sejarah di sekolah bertolak dari kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah dengan sumber belajar SNI maupun buku-buku babon lain yang telah lulus sensor dari penguasa. Pembelajaran sejarah yang tidak sesuai dengan pakem resmi pemerintah dianggap sebagai upaya yang berbahaya dan mengancam keutuhan bangsa. Sejarah berarti memegang peranan penting bagi pembentukan karakter kebangsaan dan kesadaran sejarah bagi generasi penerus.

Asvi Warman Adam (2009:144) menyitir pendapat E. H. Carr mengungkapkan bahwa sejarah adalah proses berkesinambungan dari interaksi antara sejarahwan dan fakta-fakta yang dimilikinya, suatu dialog yang tidak berkesudahan antara masa sekarang dengan masa lampau sehingga tidak ada tulisan sejarah yang sifatnya final. Dalam masalah Gerakan 30 September sebetulnya tidak ada interpretasi yang sifatnya terakhir dan tunggal. Sikap pemerintah Orde Baru yang memonopoli sejarah dengan mengeluarkan versi resmi merupakan pengekan terhadap kebebasan berpikir dan berpendapat.

Bergulirnya reformasi menyebabkan demokrasi dan kebebasan tidak dapat dibendung lagi. Berbagai informasi dan wacana baru sejarah nasional bukan lagi hal yang tabu dibicarakan. Termasuk sejarah mengenai Peristiwa 1965 bermunculan banyak versi dan sudut pandang. Barangkali entah berangkat dari sikap kehati-hatian atau masih ada kepentingan politik tertentu, pemerintah tetap memiliki peran yang menentukan wacana yang menurutnya tepat terkait dengan Peristiwa 1965. Permasalahan sensitifitas Peristiwa 1965 berimbas pada kurikulum sejarah dan sumber belajar yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

Meskipun saat ini banyak didapati sumber sejarah yang bervariasi, namun buku teks pelajaran (buku paket) tetap menjadi primadona dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. S. K. Kochhar (2008:162-163) yang mengutip *Office of Education Special Series No.3* menjelaskan posisi buku paket dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat sebagai berikut:

Walaupun buku-buku cetak dianggap hanya merupakan salah satu dari banyak sumber pembelajaran, fakta membuktikan bahwa guru terbiasa bergantung pada buku-buku tersebut. ... Biasanya buku cetak memainkan peran yang lebih utama dalam pelajaran di sekolah menengah tingkat atas daripada di tingkat sekolah dasar. Di beberapa sekolah, arah pembelajaran bidang studi yang diberikan masih ditentukan oleh isi buku cetak.

Dengan demikian di negara maju sekalipun dengan sarana dan teknik pembelajaran yang beranekaragam, buku cetak masih mendapat tempat yang penting. Buku teks menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan di negara mana pun. Apalagi dalam pembelajaran sejarah, buku teks menjadi alat bantu yang sangat diperlukan pada semua metode pembelajaran yang dilakukan. Dalam pembelajaran sejarah, guru dan buku teks masih menjadi sumber belajar yang vital.

Buku teks pelajaran sejarah yang digunakan pada tingkat SMA tentu tidak dapat lepas dari kurikulum yang digunakan. Apalagi jika terkait dengan tema-tema sejarah yang penuh kontroversi, pemerintah Orde Baru mengontrol pembelajaran sejarah sedemikian rupa agar sejalan dengan versi resmi pemerintah. SNI menjadi buku babon yang wajib menjadi sumber utama. Bahkan pada masa Nugroho Notosusanto menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, lahirlah mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kelahiran PSPB merupakan kepentingan ideologi dari pemerintah Orde Baru. Landasan hukum PSPB yaitu Tap MPR Nomor II/MPR/1983 berbeda dengan mata pelajaran lainnya yang hanya berdasarkan keputusan menteri (Agus Mulyana dan Darmiasti, 2009:93).

PSPB mengambil materi pelajaran sejarah pada tema-tema tertentu yang dianggap dapat menanamkan semangat juang dan patriotisme

peserta didik. Sejarah telah dijadikan sebagai alat untuk doktrinasi kebangsaan versi pemerintah Orde Baru. Asvi Warman Adam dalam tulisannya berjudul “Berpikir Historis Membenahi Sejarah” sebagai pengantar buku karya Sam Wineburg (2006:xvi) mengungkapkan bahwa tujuan dari PSPB bermuatan politis sesuai dengan pandangan rezim yang berkuasa. Intinya persatuan dan kesatuan mutlak diperlukan, Orde Baru harus didukung, dan PKI harus dihabisi. Dalam Kurikulum 1994 memang PSPB sudah tidak diajarkan lagi, namun mata pelajaran Sejarah tetap menekankan pada sejarah militer dan kepentingan penguasa Orde Baru.

Kini Orde Baru sudah berakhir, namun kurikulum sejarah di Era Reformasi tidak banyak mengalami perubahan. Dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) mata pelajaran Sejarah SMA kelas XII IPS Semester 1 pada Kompetensi Dasar 1.3. berbunyi: Menganalisis perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan dari ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S/PKI). Rumusan senada juga dijumpai kembali dalam Kurikulum 2013 mata pelajaran Sejarah Indonesia (wajib) Kelas XII pada Kompetensi Dasar 3.3. berbunyi: Menganalisis upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi bangsa terutama dalam bentuk pergolakan dan pemberontakan (antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S/PKI). Untuk mata pelajaran Sejarah Kelas XII Peminatan Ilmu Sosial, Kompetensi Dasar 3.3. berbunyi: Mengevaluasi secara kritis hubungan kausalitas peristiwa-peristiwa pergolakan politik dan pemberontakan antara lain: PKI Madiun 1948, DI/TII, APRA, Andi Azis, RMS, PRRI, Permesta, dan G30S/PKI 1965.

Penyajian kompetensi dasar pada dua kurikulum tersebut perlu dicermati. Memang tampaknya sepele, namun pemberian tambahan istilah PKI pada G30S memberikan perspektif tertentu bahwa G30S adalah sama dengan PKI. Minimal memberi klaim bahwa PKI adalah dalang sekaligus pelaku tunggal dari gerakan tersebut. Padahal seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa pelaku, dampak, dan pengaruh dari peristiwa ini tidak hanya mengarah pada PKI saja. Ada banyak versi dan

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

wacana yang bermunculan dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang ingin mengetahuinya. Sehingga alangkah lebih bijak apabila dalam pembelajaran sejarah digunakan istilah Gerakan 30 September saja yang tidak merujuk pada versi dan wacana apapun. Tentunya hal ini dibarengi dengan menyajikan materi yang bervariasi, netral, dan tidak menggiring peserta didik untuk condong pada salah satu versi saja.

Buku teks Sejarah untuk SMA Kelas XII Program Ilmu Sosial yang ditulis oleh I Wayan Badrika (2006) menggunakan istilah G30S/PKI sesuai istilah resmi pada KTSP. Pembahasan dimulai dari sebab munculnya G30S/PKI dan usaha PKI memperkuat kedudukan. Pembahasan berlanjut pada kronologis peristiwa penculikan para jenderal, penumpasan G30S/PKI hingga upaya pemulihan keamanan dan ketertiban. Terakhir dibicarakan tentang peralihan kekuasaan dari Soekarno kepada Soeharto.

Secara umum I Wayan Badrika (2006) belum memberi wacana-wacana baru mengenai Gerakan 30 September. Pembahasannya masih sama dengan versi resmi pemerintah Orde Baru. Memang ada beberapa hal baru yang diungkapkan seperti rencana pengangkatan Pranoto Reksosamudro sebagai Panglima AD menggantikan Yani yang tewas. I Wayan Badrika juga tidak menyebutkan secara jelas bahwa PKI adalah pelaku tunggal dari Gerakan 30 September. I Wayan Badrika hanya menuliskan bahwa G30S/PKI ditengarai didukung oleh PKI. Hal ini menunjukkan keterlibatan PKI dalam Gerakan 30 September bisa jadi tidak sepenuhnya. Akan tetapi I Wayan Badrika tidak memberi penjelasan mengenai kemungkinan-kemungkinan lain.

Buku teks pelajaran Sejarah untuk tingkat SMA lainnya yang cukup banyak digunakan ialah tulisan Magdalia Alfian, dkk (2007). Buku paket Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial terbitan Esis ini juga menggunakan istilah G30S/PKI. Akan tetapi yang menarik dalam buku ini ada bagian yang membahas berbagai pendapat mengenai Gerakan 30 September. Magdalia Alfian menuliskan bahwa sekarang ini sumber-sumber yang menyatakan adanya perbedaan versi mengenai Peristiwa 1965 ini telah banyak tersebar dan menjadi wacana yang cukup krusial.

Magdalia Alfian (2007:105-106) menyajikan beberapa analisis mengenai Gerakan 30 September. Pendapat-pendapat tersebut antara lain: (1) versi resmi Orde Baru tentang PKI sebagai dalang tunggal, (2) terjadinya konflik intern dalam tubuh AD (*Cornell Paper*), (3) versi Soeharto sebagai dalang, (4) versi bahwa Soekarno sudah mengetahui peristiwa tersebut sebelumnya, dan (5) teori adanya klik dalam AD dari Harold Crouch. Magdalia Alfian juga menyampaikan bahwa polemik tentang Peristiwa Gerakan 30 September sampai saat ini semakin banyak, tetapi semua itu harus diuji kebenarannya. Sayangnya buku teks ini tidak memberikan ulasan yang cukup mendalam pada setiap versi. Teori-teori itu hanya dibahas sekilas-sekilas. Wacana lain seperti peran Amerika Serikat melalui CIA juga belum dikemukakan dalam buku teks ini. Akan tetapi sudah cukup baik karena tulisan Magdalia Alfian ini telah mencoba menghadirkan sesuatu yang tidak biasa dalam buku pelajaran sejarah lainnya. Permasalahannya terjadi ketidaksinkronan antara keberanian menyajikan berbagai wacana soal pelaku Gerakan 30 September dengan penggunaan istilah G30S berembel-embel PKI di belakangnya.

Perkembangan terbaru mata pelajaran sejarah dalam Kurikulum 2013 dengan pendekatan saintifik diharapkan dapat menumbuhkan sikap kritis dan analitis peserta didik dalam memaknai suatu peristiwa sejarah. Pada peminatan ilmu sosial, kompetensi dasar yang terkait dengan pokok bahasan Peristiwa 1965 berbunyi mengevaluasi secara kritis hubungan kausalitas dari peristiwa G30S/PKI. Capaian yang diharapkan tentu agar peserta didik mampu berpikir kritis terhadap Peristiwa 1965 sejalan dengan perkembangan wacana mengenai peristiwa tersebut. Maka diperlukan berbagai sumber belajar sejarah yang lebih bervariasi dengan berbagai sudut pandang.

Bervariasinya sumber belajar juga berimbas pada buku teks pelajaran. Terkait dengan penulisan buku teks pelajaran memang dihadapkan pada dua pendekatan yaitu pendekatan keilmuan dan pendekatan politik yang bersifat ideologis. Dua pendekatan ini seharusnya tidak ditempatkan pada hubungan yang dikotomis. Pendekatan ideologis dapat dilakukan asal tidak menghilangkan daya kritis siswa. Kemutlakan kebenaran sejarah pada satu ideologi harus

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

dihindarkan. Pendekatan ideologis dapat ditekankan pada upaya membangun watak bangsa. Sementara itu pendekatan saintifik berperan penting agar daya nalar peserta didik terbangun. Sejarah bukanlah dongeng isapan jempol belaka namun realitas kehidupan manusia (Agus Mulyana dan Darmiasti, 2009:86-87).

Sumber belajar tidak hanya buku pelajaran, namun dapat juga digunakan berbagai buku ilmiah populer yang membahas wacana-wacana lain tentang Peristiwa 1965. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi juga memudahkan untuk mengakses sumber melalui pemanfaatan internet. Penggunaan media audio visual juga dapat dimanfaatkan untuk menambah pemahaman peserta didik. Misalnya dengan memutar pidato Presiden Soekarno tanggal 17 Agustus 1966 yang berjudul *Jasmerah* agar peserta didik lebih memahami kedudukan Supersemar. Peserta didik juga dapat diajak menyaksikan film dokumenter tentang pembunuhan massal terhadap masyarakat sipil yang dituduh sebagai pengikut atau simpatisan komunis. Jumlah yang dipastikan terbunuh memang masih kontroversi pula. Robert Cribb menganalisis dari berbagai sumber yang pro maupun anti Orde Baru mengemukakan angka terendah 78.000 hingga terbanyak 2.000.000 orang (Michael Wood, 2013:195). Memahami sisi yang satu ini bertujuan agar peserta didik memiliki perhatian terhadap nilai-nilai kemanusiaan sehingga tragedi serupa tidak terulang di kemudian hari.

Pada akhirnya memang kita perlu mengambil jarak dengan kontroversi yang muncul untuk mencari akar permasalahan serta solusi yang bijak bagi kehidupan bangsa ke depan. Sebagai pendidik menjadi kurang tepat ketika kita justru berlutut dengan kontroversi itu untuk menentukan berbagai kemungkinan yang ada menurut kecenderungan kita. Ada hal yang jauh lebih penting menjadi tugas utama kita yaitu menanamkan kesadaran sejarah agar tercetak generasi yang lebih arif bijaksana menghadapi persoalan bangsanya.

Generasi bangsa ini harus menyadari bahwa perbedaan sebenarnya merupakan suatu yang lumrah dalam kehidupan manusia. Pendapat Francois Caron yang dikutip oleh Asvi Warman Adam (2007:1) mengungkapkan bahwa: “Tatkala sejarah menyadarkan kita tentang

perbedaan-perbedaan, ia sebetulnya telah mengajarkan toleransi dan kebebasan”. Masyarakat yang sulit menerima perbedaan dan cenderung bersikap intoleran sebenarnya merupakan masyarakat yang sakit. Jika ada sejarawan, dosen sejarah, dan guru sejarah yang sulit menerima perbedaan persepsi dan tafsir terhadap suatu peristiwa sejarah maka perlu mengadakan permenungan. Sejauh mana kita dapat belajar dari sejarah atau sejarah hanya sekedar pengetahuan belaka yang tidak berpengaruh bagi pandangan dan hidup kita sehari-hari.

Ada anggapan bahwa sejarah secara konseptual didominasi oleh aspek militer dan politik. Sejarah hanya membahas kehidupan para tokoh penguasa, perang, pemberontakan, dan perluasan kekuasaan. Akan tetapi pemikiran ini perlu diubah, sejak memasuki abad XX, peranan ilmu pengetahuan semakin penting. Sejarah merupakan ilmu yang berbicara mengenai masyarakat dan bukan hanya menjadi alat penguasa. Sejarah modern tidak hanya memperhatikan peristiwa-peristiwa politik dalam kehidupan berbangsa, namun juga aspek ekonomi, sosial, budaya, dan religius dalam perkembangan bangsa (S. K. Kochhar, 2008:9). Paradigma semacam ini penting agar sejarah tidak mudah jatuh terseret arus politik dan kekuasaan.

PENUTUP

Pembelajaran sejarah sebagai suatu kajian ilmiah perlu membuka diri terhadap berbagai pemikiran mengenai Peristiwa 1965. Hal ini bukan sekedar menampung berbagai wacana yang ada untuk memperkaya pengetahuan sejarah namun lebih dari itu mengajak peserta didik mampu berpikir kritis analitis dan memiliki kebebasan terhadap ilmu. Sebagai generasi penerus bangsa, peserta didik harus memiliki pandangan yang mendalam dan luas tentang Peristiwa 1965 yang berpengaruh besar bagi perjalanan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkannya diperlukan peran pemerintah dengan memberikan jaminan bagi kebebasan berpikir dan berpendapat khususnya mengenai Peristiwa 1965. Guru sebagai pendidik juga perlu berpikiran terbuka dan berwawasan luas agar dapat membantu peserta didik memahami berbagai kontroversi dan polemik yang muncul seputar

Mengkritisi Sumber Belajar.... (Hendra Kurniawan)

Peristiwa 1965. Pembelajaran sejarah perlu mengubah paradigmanya guna menumbuhkembangkan kesadaran sejarah generasi muda bangsa ini dan bukan justru menjadi alat kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Mulyana dan Darmiasti. 2009. *Historiografi di Indonesia: Dari Magis-Religius Hingga Strukturis*. Bandung: Refika Adhitama.

Asvi Warman Adam. 2006. *Soeharto File: Sisi Gelap Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_____. 2006. *Pengantar: Berpikir Historis Membenahi Sejarah*. pp. vi-xix. dalam Sam Wineburg, *Berpikir Historis: Memetakan Masa Depan Mengajarkan Masa Lalu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

_____. 2007. *Seabad Kontroversi Sejarah*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

_____. 2009. *Pelurusan Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Baskara T. Wardaya. 2007. *Membongkar Supersemar!: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno*. Yogyakarta: Penerbit Galangpress.

Beise, Kerstein. 2004. *Apakah Soekarno Terlibat Peristiwa G30S*. Jakarta: Penerbit Ombak.

Crouch, Harold. 1999. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Fic, Victor M.. 2005. *Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Studi Tentang Konspirasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Hariyono. 2013. Kontroversi Sejarah Indonesia: Distorsi Komunikasi yang Sistemik, Sebuah Dialektika Tanpa Sintesa. *Seminar Nasional Menumbuhkembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Melalui Pembelajaran Sejarah Kontroversial*. Surakarta: 29 Mei 2013.

- Harry A. Poeze. 2008. *Memuliakan, Mengutuk, dan Mengangkat Kembali Pahlawan Nasional: Kasus Tan Malaka*. pp. 155-175. dalam Henk Schulte Nordholt, dkk. (ed), *Perspektif Baru Penulisan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia-KITLV.
- Hasta Mitra. 2007. *Dokumen CIA: Melacak Penggulingan Sukarno dan Konspirasi G30S-1965* (Joesoef Isak, Ed.). Jakarta: Hasta Mitra.
- I Wayan Badrika. 2006. *Sejarah untuk SMA Kelas XII Program Ilmu Sosial*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kochhar, S. K. 2008. *Pembelajaran Sejarah*. Jakarta: Grasindo.
- Magdalia Alfian, dkk. 2007. *Sejarah untuk SMA dan MA Kelas XII Program Ilmu Pengetahuan Sosial*. Jakarta: Esis.
- McGregor, Katharine E. 2008. *Ketika Sejarah Berseragam: Membongkar Ideologi Militer dalam Menyusun Sejarah Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Syarikat.
- Pour, Julius. 2010. *Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, dan Petualang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Rosihan Anwar. 2007. *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Scott, Peter Dale. 2007. *Peran CIA dalam Penggulingan Sukarno (edisi revisi)*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sekretariat Negara RI. 1994. *Gerakan 30 September, Pemberontakan Partai Komunis Indonesia: Latar Belakang, Aksi, dan Penumpasannya*. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Sundhaussen, Ulf. 1986. *Politik Militer Indonesia 1945-1967: Menuju Dwi Fungsi ABRI*. Jakarta: LP3ES.
- Wood, Michael. 2013. *Sejarah Resmi Indonesia Modern: Versi Orde Baru dan Para Penantangannya*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.